

**PEMUDA DAN POLITIK :  
STUDI KASUS CALON ANGGOTA LEGISLATIF  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILU 2024 DI  
KABUPATEN SOPPENG**



**ANDI MUHAMMAD REZKY RISWANDHA**

**E041191002**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**PEMUDA DAN POLITIK :  
STUDI KASUS CALON ANGGOTA LEGISLATIF  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILU 2024 DI  
KABUPATEN SOPPENG**

**ANDI MUHAMMAD REZKY RISWANDHA**

**E041191002**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN PENGAJUAN**

### **PEMUDA DAN POLITIK : STUDI KASUS CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN SOPPENG**

Yang Diajukan Oleh :  
**ANDI MUHAMMAD REZKY RISWANDHA**  
**E041191002**

Skripsi,

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### PEMUDA DAN POLITIK : STUDI KASUS CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN SOPPENG

Yang Diajukan Oleh :  
**ANDI MUHAMMAD REZKY RISWANDHA**  
**E041191002**

Skripsi,  
telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada tanggal 25 April  
2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Ilmu Politik  
Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

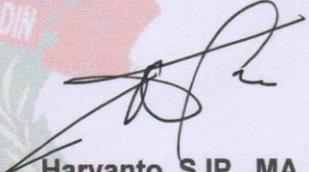
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.S.i  
NIP. 19710917 199703 1 001



Haryanto, S.IP., MA  
Nip. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.  
Nip. 19791218 200812 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “**PEMUDA DAN POLITIK : STUDI KASUS CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN SOPPENG**” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (**Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.S.i** sebagai Pembimbing Utama dan **Haryanto, S.IP, M.A** sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 April 2024



**ANDI MUH REZKY RISWANDHA**  
NIM E041191072

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pemuda dan Politik: Studi kasus Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilu 2024”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.Pol.).

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bapak **Ir. Andi Risal., MT** dan Ibunda Almarhumah Ibu **Dr.Hj.Andi Syamsudduha, Sp.PK, M.kes.** atas segala kasih sayanginya selama ini serta dukungan dan doa tertulis dan terikhlas yang pernah saya dapatkan di dunia ini. Serta saudara(i) saya **Andi Diva Delfina, Andi Nayla Azzahra, dan Andi Muhammad Arsyah Al Ghiffari** yang juga senantiasa membantu dan memberi semangat kepada penulis selama ini

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Bapak **Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.S.i** dan Bapak **Haryanto, S.IP., M.A.** yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018- 2022, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** yang memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**, sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.**, beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak Sutamin, Ibu Irma, dan Pak Herman.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.**, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Seluruh dosen-dosen Departemen Ilmu Politik: Bapak **Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.**, Alm. Bapak **Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag.**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.**, Ibu **Endang Sari, S.IP., M.Si.**, Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.**, Ibu **Ummi Suci Fathia**

- Bailusy, S.IP., M.IP.,** Bapak **Zulhajar, S.IP., M.A.,** dan Ibu **Dian Ekawaty, S.IP., M.A.,** yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S.T.,** dan Ibu **Musriati S.E.,** yang telah membantu dan memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Departemen Ilmu Politik.
  9. Kepada seluruh narasumber / informan Ibu **Dr.HJ. A. Nurhidayati Zainuddin, M.Si.** Saudara **Fadil Fausan R,** Saudari **Lala Vitaloka,** Saudari **Andi Aura Salsabila** atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
  10. Kepada seluruh Keluarga Besar **H. Andi Muhammad Yunus Singke** dan **Andi Muhammad Said Wase.** Terima kasih untuk banyaknya perhatian, kasih sayang, dukungan, motivasi dan doanya selama ini. Segala jalan yang ditempuh penulis adalah untuk mengharumkan nama keluarga besar ini.
  11. Kepada Teman- teman “Negara Sahabat” , **Ahmad Fajri, Amal Hamdika, Resky Ramadhan Rusdi, Sandi Kurniawan, Ahmad Hidayat, Muhammad Alfiandy Gunawah, Dinul Alamsyah, Nasrullah, Muh Zuljalali , Ahmad Fikrul, Amirul Ikhsan, Andi Saddam Fitratullah, Muh Rafly Yusuf, Muhammad Adrian, M Galih Garysha, Muhlis, Nuzul Fajrullah, Gilang Maulana, Multazam, Chaerun Fitra, Ikhsan Qadri** yang menjadi saudara tak sedarah penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Teman yang menjadi kompas hidup, mengarahkan ketika tersesat, mendorong ketika lambat, dan saling merayakan ketika senang. Terimakasih atas semua dukungannya, bagi penulis dukungan kalian sangat mahal harganya.
  12. Kepada Sahabat Seperjuangan Penulis, **Abzar Sabri, A. Akram Fadlurochman, Fahmi Huwaidy, A.Arya Ridha, Resky Ramadhan**

**Rusdi, M Galih Garysha, M Rafly Yusuf, Muslihul achyar, Nasrullah, Idil Akbar Fatwa, Harry Muhammad Anis, Illiani Ashari, Allescia Nur Ramadhani, A. Inayah Muslimah, Khumairah Zalsabila Putri, Nanda Triana, Nurfadilla Wafiah, Titin Aryani, Putri Zahwa Biantika Balqis** yang sejak SMP Senantiasa kebersamai penulis dalam suka maupun duka hingga saat ini.

13. Kepada Sahabat Seperjuangan Penulis, **Chuznul Maryah Baharsyah, Nurul Wahida Zalsabila, Muhammad Aqsha Lukman, Muhammad Geys Jeihan, Fadlil Fauzan, Larry Leo Immanuel S, Muslichul Achyar**, yang telah kebersamai penulis dalam proses pada saat SMA sampai sekarang.
14. Kepada Teman-Teman **KKN Tematik Gelombang 109 Tahun 2023 Terkhusus teman-teman Posko Larona**, Terima Kasih atas support, kebersamaan dan kenangannya selama KKN.
15. Kepada seluruh teman-teman **Ilmu Politik angkatan 2019, Diplomasi 2019, Himapol Fisip Unhas dan IMPS Kopperti Unhas**, Terima Kasih atas segala lika-liku yang telah dilewati bersama sebagai sebuah keluarga kecil yang harmonis. Doa penulis untuk kesuksesan teman-teman kelak.
16. kepada Nur'aqilah yang selalu mendampingi penulis selama ini, terima kasih telah banyak bersabar dan menjadi partner sekaligus support system peneliti dalam setiap proses yang dilalui bersama dalam penyusunan skripsi ini, semoga hal-hal baik selalu menghampiri.
17. Kepada seluruh kerabat baik penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan suasana positif serta lingkungan yang sehat untuk penulis. Terimakasih karna telah menjadi tempat penulis bertukar pikiran, bertukar cerita, dan bertukar rasa. Semoga hal-hal baik menghampiri kehidupan kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan

ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki kelalaian dan keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis,

**Andi Muh Rezky Riswandha**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	5
1.3    Tujuan Penelitian .....	5
1.4    Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1.    Secara Teoritis.....	5
1.4.2.    Secara Praktis .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1    Partisipasi Politik.....	7
2.2    Konsep Representasi Politik .....	9
2.3    Rekrutmen Politik .....	12
2.4    Kategori Partisipasi Politik.....	13
2.5    Penelitian Terdahulu .....	14
2.6    Kerangka Berfikir.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>17</b>

3.1	Tipe dan Dasar penelitian.....	17
3.2	Lokasi dan Objek Penelitian.....	17
3.3	Jenis Data .....	18
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.5	Informan Penelitian .....	19
3.6	Teknik Analisis Data .....	20
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>21</b>
4.1	Lokasi Penelitian .....	21
4.1.1.	Jumlah Penduduk .....	23
4.1.2.	Politik.....	24
4.2	Partisipasi pemuda dalam kontestasi politik di kabupaten soppeng terkhusus Partai Persatuan Pembangunan. ....	25
4.2.1.	Representasi Politik.....	25
4.2.2.	Partisipasi Politik .....	27
4.3	Faktor yang mempengaruhi pemuda untuk turut serta sebagai calon anggota legislatif partai PPP tahun 2024 di Kabupaten Soppeng.....	28
4.3.1.	Idealisme Pemuda .....	28
4.3.2.	Kuasa Modal dan Relasi .....	31
4.3.3.	Pemenuhan Syarat Administrasi Partai .....	34
4.3.4.	Rekrutmen Politik.....	38
4.3.5.	Orientasi Pemuda Menjadi Caleg Kabupaten Soppeng partai PPP Tahun 2024 .....	41
4.4	Proses Kontestasi Politik Caleg Muda Kabupaten Soppeng Partai PPP Tahun 2024.....	42
4.4.1.	Social Media Campaign.....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>47</b>
5.1	Kesimpulan .....	47
5.2	Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>49</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Kabupaten Soppeng Menurut Kecamatan Tahun 2022 .....	22
Tabel 2. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan Di Kabupaten Soppeng .....	23
Tabel 3. komposisi anggota DPRD Kabupaten Soppeng .....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hierarki Partisipasi Politik.....	9
Gambar 2 Kabupaten Soppeng .....	21
Gambar 3 Peta Sebaran Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Soppeng ..	25

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Partai PPP Dalam PEMILU 2024 .....	52
Lampiran 2 Hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilu 2024 .....	54
Dokumentasi 2 Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Soppeng .....	56
Dokumentasi 3 Caleg Legislatif Muda Partai PPP, LV .....	56
Dokumentasi 4 Caleg Legislatif Muda Partai PPP, FF .....	57
Dokumentasi 5 Caleg Legislatif Muda Partai PPP, AA .....	57

## ABSTRAK

### ANDI MUHAMMAD REZKY RISWANDHA. **PEMUDA DAN POLITIK : STUDI KASUS CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN SOPPENG**

(dibimbing oleh Muhammad dan Haryanto)

**Latar Belakang.** Banyak pemuda saat ini tidak memilih (golput). Pemuda juga beranggapan bahwa semua calon sama saja untuk korupsi Pemuda atau generasi milenial berpartisipasi dalam sistem politik dan tidak boleh berprasangka buruk terhadap pesta Demokrasi atau pemilu. Sikap anak muda yang memunculkan sikap apatisme. PPP berusaha mewedahi anak muda membuat perubahan dan turut serta ke dunia politik. **Tujuan** penelitian ini bertujuan mengkaji faktor yang memengaruhi partisipasi pemuda dalam kontestasi politik **Metode** dalam penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi. Adapun informan berasal dari calon anggota legislatif muda partai PPP dan pengurus partai PPP. Penentuan informan tersebut dipilih secara sengaja (purposive). **Hasil** Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemuda dalam kontestasi politik terbagi menjadi tiga yaitu idealisme pemuda, kuasa relasi dan modal, serta pelengkap syarat administratif. **Kesimpulan,** Partai politik harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang massif kepada pemuda. Agar pemuda benar-benar mampu terlibat dan berpartisipasi dalam pentas politik dengan landasan yang kuat. Pemerintah Daerah harus bersinergi dengan Partai Politik dan Organisasi Kepemudaan dalam memberikan ruang-ruang edukasi politik kepada pemuda. Intervensi pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan penguatan dalam membentuk karakter serta mental politik pemuda yang lebih baik.

**Kata kunci : Partisipasi, Pemuda , Politik, Pemilihan Umum**

## ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD REZKY RISWANDHA. **YOUTH AND POLITICS: CASE STUDY OF LEGISLATIVE CANDIDATES OF THE PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTY IN THE 2024 ELECTIONS IN SOPPENG DISTRICT** (supervised by Muhammad and Haryanto).

**Background.** Many young people today do not vote (golput). Youth also assume that all candidates are the same for corruption Youth or millennial generation participate in the political system and should not be prejudiced against the Democratic party or elections. The attitude of young people who give rise to apathy. PPP tries to accommodate young people to make changes and participate in politics. **The purpose** of this study aims to examine the factors that influence youth participation in political contestation. **The method** in the study uses qualitative methods. Data collection is done by means of interviews, observation. The informants came from young legislative candidates of the PPP party and PPP party administrators. The informants were selected purposively. **The results** of this study show that the factors that influence youth participation in political contestation are divided into three, namely youth idealism, power relations and capital, and complementary administrative requirements. **In conclusion**, political parties must provide massive political and democratic education to youth. So that youth are truly able to engage and participate in the political stage with a strong foundation. Local governments must synergize with political parties and youth organizations in providing political education spaces for youth. Local government intervention is expected to be able to provide strengthening in shaping the character and political mentality of better youth.

**Keywords: Participation, Youth, Politics, Election**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemuda memiliki karakteristik yang penting dalam politik. Mereka cenderung memiliki semangat, energi, kreativitas, dan optimisme yang dibutuhkan untuk menginspirasi dan mendorong perubahan. Mereka juga sering kali memiliki pandangan yang segar, tanpa beban masa lalu atau kepentingan yang mapan, sehingga mereka dapat membawa gagasan baru dan inovasi ke dalam diskusi politik. Selain itu, pemuda sering kali terhubung dengan perkembangan teknologi dan media sosial, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, berorganisasi, dan menyebarkan pesan politik dengan cepat dan luas. Namun, pemuda juga menghadapi tantangan dalam keterlibatan politik. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya pengalaman politik, kurangnya akses ke sumber daya dan jaringan politik, serta sikap skeptisisme terhadap politik dan institusi politik. Pemuda juga sering menghadapi kesulitan dalam mempengaruhi keputusan politik yang diambil oleh pemerintah atau partai politik yang lebih mapan.

Untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam politik, penting bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong partisipasi politik pemuda. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang lebih baik, pemberian pelatihan keterampilan kepemimpinan, pembentukan lembaga atau organisasi pemuda yang mendorong keterlibatan politik, dan penciptaan kesempatan bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam era digital saat ini, pemuda juga dapat memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan pengaruh mereka dalam politik. Mereka dapat menggunakan platform online untuk membangun gerakan, menyebarkan informasi, dan memobilisasi pendukung. Secara keseluruhan, pemuda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan dan memainkan peran penting dalam politik. Dengan memberikan dukungan yang tepat dan menciptakan lingkungan yang inklusif, masyarakat dapat memastikan bahwa suara pemuda didengar dan mereka memiliki peran yang signifikan dalam membentuk masa depan politik dan sosial negara.

Indonesia di era reformasi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Salah satu bunyinya dalam Pasal 17 ayat 3 menerangkan bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan salah satunya adalah pendidikan politik dan demokratisasi. Khusus di Sulawesi Selatan, dikuatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan, Pada pasal 12 ayat 1 huruf c menerangkan pemuda berperan aktif sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan, yang secara lebih rinci Diperjelas dalam ayat (4) menerangkan peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan beberapa hal, salah satunya pendidikan politik dan demokratisasi. Atas dasar hukum inilah menjadi landasan konstitusional pemuda harus bergerak aktif dalam politik.

Calon legislatif adalah individu yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dalam sebuah badan legislatif, seperti parlemen atau dewan legislatif di tingkat lokal, regional, atau nasional. Profil calon legislatif dapat beragam, tergantung pada sistem politik dan aturan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, profesional, pebisnis, aktivis masyarakat, atau politisi berpengalaman. Mereka biasanya memiliki keinginan kuat untuk berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan dan perundang-undangan, serta mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah pemilihannya.

Persyaratan untuk menjadi calon legislatif juga bervariasi. Umumnya, calon harus memenuhi syarat usia, kewarganegaraan, dan mungkin juga syarat pendidikan atau pengalaman kerja tertentu. Beberapa negara menerapkan batasan atau larangan terhadap calon yang memiliki konflik kepentingan atau catatan kriminal tertentu. Di beberapa sistem politik, partai politik memiliki peran penting dalam menentukan calon legislatif melalui proses seleksi internal atau pemilihan internal. Peran calon legislatif sangat penting dalam proses politik dan legislasi. Jika terpilih, mereka akan menjadi perwakilan rakyat dan bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan konstituen mereka di dalam badan legislatif. Tugas utama mereka termasuk mengusulkan, membahas, dan mempengaruhi undang-undang dan kebijakan publik. Calon legislatif juga bertanggung jawab untuk memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan konstituen mereka, menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, dan mengadvokasi kepentingan publik. Selain itu, calon legislatif seringkali berperan dalam kampanye politik. Mereka harus mampu membangun basis

dukungan, berkomunikasi dengan konstituen, dan mengajukan visi dan program kerja yang menarik untuk memenangkan pemilihan. Kampanye politik melibatkan kegiatan seperti mengorganisir pertemuan publik, debat, kampanye door-to-door, serta penggunaan media massa dan platform digital untuk mencapai pemilih.

Partai Politik merupakan kelompok yang orang di dalamnya punya nilai, orientasi, dan tujuan yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui cara konstitusional. Adanya partai politik tidak lepas dari fungsi serta peran dalam pengelolaan suatu negara. Fungsi utama partai politik yang menjadikan adanya partai politik menjadi sebuah keharusan dalam sebuah negara, fungsi tersebut adalah partai politik ada untuk bersaing dalam pemilu, menghimpun segala aspirasi masyarakat dan membuat kebijakan serta mempersiapkan pemimpin untuk pemerintahan.

Fungsi partai politik yaitu menjadi sarana orang-orang yang ada dalam ruang lingkup masyarakat untuk ikut dalam kegiatan politik melalui rekrutmen partai politik. Adanya rekrutmen partai politik merupakan sebuah proses menyeleksi kader-kader yang dapat menjalankan amanah dengan baik dan benar jika terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan proses rekrutmen partai politik yaitu nilai-nilai politik dan pola rekrutmen. Hal-hal tersebut penting agar kader yang dipilih dan terpilih mempunyai kompetensi dan nilai yang bagus di masyarakat.

Kontestasi politik melibatkan berbagai tahapan, termasuk kampanye politik, pemilihan umum, debat, dan perdebatan kebijakan. Partai politik dan calon bersaing untuk mendapatkan dukungan dan suara pemilih. Mereka berupaya untuk mengkomunikasikan visi, platform, dan program kerja mereka kepada pemilih potensial. Kampanye politik melibatkan pengorganisasian acara, pertemuan publik, iklan politik, serta penggunaan media massa dan platform digital untuk mempengaruhi persepsi dan preferensi pemilih.

Kontestasi politik mencerminkan perbedaan pendapat dan perbedaan dalam preferensi dan nilai-nilai politik. Pemilihan umum dan proses politik memberikan ruang bagi pemilih untuk mengekspresikan pilihan mereka, serta memberikan kesempatan bagi calon untuk membujuk dan mempengaruhi pemilih. Kontestasi politik memainkan peran penting

dalam memastikan akuntabilitas politik, pluralisme, dan perwakilan yang efektif dalam sistem demokrasi.

Selama kontestasi politik, isu-isu kebijakan menjadi sorotan. Calon dan partai politik berusaha untuk memperjuangkan posisi mereka tentang berbagai masalah, termasuk ekonomi, lingkungan, kebijakan sosial, keamanan, dan hak asasi manusia. Kontestasi politik juga melibatkan serangkaian debat dan perdebatan di antara calon untuk menguji pengetahuan, keterampilan, dan visi mereka. Konsekuensi dari kontestasi politik dapat mencakup perubahan kekuasaan politik, implementasi kebijakan yang berbeda, dan perubahan dalam dinamika politik dan sosial. Pemenang dalam kontestasi politik akan mendapatkan otoritas politik dan tanggung jawab untuk melaksanakan janji kampanye mereka serta mengelola pemerintahan. Kontestasi politik juga dapat mempengaruhi opini publik, memperkuat atau mengubah paradigma politik, dan membentuk dinamika politik jangka panjang. Dalam demokrasi yang sehat, kontestasi politik yang berimbang dan adil penting untuk menjaga pluralisme, dialog yang sehat, dan pilihan yang berkualitas bagi pemilih. Penting bagi partai politik dan calon untuk menjunjung tinggi integritas, etika politik, dan prinsip demokrasi dalam proses kontestasi politik.

Generasi milenial atau pemuda merupakan bagian dari anggota masyarakat dan komponen bangsa, pemuda tidak bisa selamanya menghindar dari politik. Karena pada hakekatnya pemuda merupakan mahluk politik. Setiap pemilu, 30 persen dari total jumlah pemilu adalah generasi milenial atau pemuda dengan rentan usia 17-30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sisanya yaitu 70 persen orang dewasa. Hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah partisipasi generasi milenial akan berpengaruh dalam hasil pemilu.

Banyak pemuda saat ini tidak memilih (golput), ini merupakan sebuah pandangan yang tidak benar. Pemuda juga beranggapan bahwa semua calon sama saja untuk korupsi. Pemuda atau generasi milenial berpartisipasi dalam sistem politik dan tidak boleh berprasangka buruk terhadap pesta Demokrasi atau pemilu. Sikap anak muda yang memunculkan sikap apatisme, membuat PPP hadir dengan sesuatu yang baru dan beda. PPP berusaha mewadahi anak muda membuat perubahan dan turut serta ke dunia politik.

Kabupaten soppeng merupakan salah satu daerah di Sulawesi selatan yang melaksanakan pemilihan calon anggota legislatif. Dari data

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng tahun 2020 menunjukkan jumlah usia pemuda (usia 15-34 tahun) di daerah ini sebanyak 70.931 jiwa. Partai PPP sendiri mengusung 30 orang bakal calon anggota legislatif di kabupaten soppeng, 3 orang diantaranya berumur dibawah 25 tahun, Hal ini yang menjadi perhatian dan ketertarikan penulis untuk meneliti partisipasi pemuda dalam kontestasi politik di kabupaten soppeng karena pemuda seringkali membawa ide-ide yang inovatif dan pandangan yang baru terhadap isu -isu politik. Caleg muda lebih baik menangkap aspirasi dan harapan generasi muda dalam proses membuat kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dengan judul "***Pemuda dan Politik : Studi kasus Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan pembangunan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Soppeng***"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi pemuda dalam kontestasi politik pada pemilihan calon anggota legislatif Partai PPP tahun 2024 di kabupaten Soppeng?
2. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pemuda untuk turut serta sebagai calon anggota legislatif partai PPP tahun 2024 di Kabupaten Soppeng?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui partisipasi pemuda dalam kontestasi politik pada pemilihan calon anggota legislatif Partai PPP tahun 2024 di kabupaten soppeng.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemuda untuk turut serta dalam kontestasi calon anggota legislatif partai PPP tahun 2024 di Kabupaten Soppeng

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu politik khususnya program studi ilmu politik dalam hal kajian mengenai partisipasi pemuda dalam kontestasi politik

#### **1.4.2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau penelitian terdahulu bagi peneliti selanjutnya maupun sebagai informasi bagi pembaca

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan peneliti jawab melalui penelitian ini. Kemudian dalam bab ini juga diuraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya.

#### **2.1 Partisipasi Politik**

Konsep partisipasi dalam proses pembangunan memiliki arti yang dalam. Hal ini tercermin dari pendapat atau interpretasi yang diteorikan para ahli maupun pengelola pembangunan mengenai pentingnya partisipasi sebagai salah satu elemen yang menentukan keberhasilan pembangunan (Tangkilisan, 2005: 320).

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Akan tetapi, keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Agustino, 2007: 58).

Budiardjo (2008:367), partisipasi politik mengungkapkan pada dasarnya studi tersebut hanya lebih fokus pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi analisis partisipasi politik pun diperluas. Dalam analisa politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhirakhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara berkembang banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

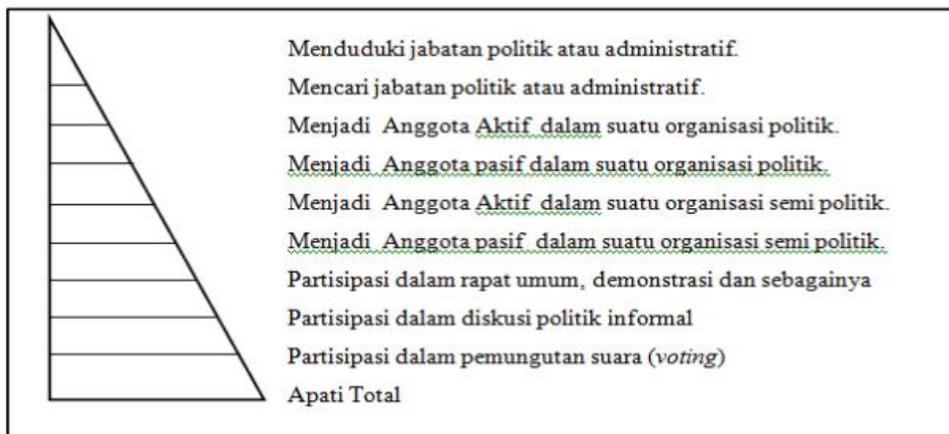
Teori demokrasi klasik memandang bahwa warga negara tertarik untuk dan mau berpartisipasi dalam politik. Karena mereka berpartisipasi dalam proses politik, sesuai dengan aturan dan menggunakan nilai-nilai. Dalam teori demokrasi klasik ini, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan. Kaase dan Marsh dalam

Mujani (2007:54) berpendapat bahwa partisipasi politik sesuai dengan unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti rasionalitas, kontrol, member respon yang cepat, fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik. Partisipasi dalam hal ini, berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik. Agustino (2007:58) membagi kegiatan warga Negara menjadi dua, yakni :

1. Mempengaruhi isi kebijakan umum, dan
2. Ikut membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Partisipasi politik merupakan perilaku politik, tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik. Secara literal, Agustino (2007:58) menyebutkan partisipasi politik adalah, kegiatan legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak ditunjuk untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah atau tindakan mereka. Membatasi lingkup partisipasi politik juga diungkapkan oleh Parry, Mosley dan Day yang mengatakan sebagai, keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Jika demikian, maka kepedulian utama dari partisipasi politik tindakan yang dilakukan oleh warga yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil hanya oleh perwakilan rakyat dan para pejabat pemerintah. Karenanya tidak dapat disangsikan lagi bahwa partisipasi politik lebih dihubungkan dengan demokrasi politik yang membuka ruang bagi aspirasi masyarakat sipil dalam sesungguhnya.

Menurut Rush dan Althoff dalam Damsar (2010:185) hierarki tertinggi dari suatu partisipasi politik adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan hierarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang diperlihatkan oleh bagan hierarki partisipasi politik, dimana garis vertikal segitiga menunjukkan hierarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.



Gambar 1 Hierarki Partisipasi Politik

Sumber : Tingkatan partisipasi politik Rush & Althoff (2010:185)

Gambaran yang telah dituangkan oleh Rush dan Althoff di atas dapat kita asumsikan bahwa semakin tinggi tingkat atau keinginan suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik semakin kecil jumlah masyarakat yang terlibat di dalamnya. Namun sebaliknya semakin ke bawah tingkatannya semakin kecil peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik. Apa yang telah dijelaskan Rush dan Althoff dari hirarki tersebut bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati di lingkungan masyarakat kita ialah pemberian suara pada Pemilu.

Partisipasi politik dalam pemberian suatu tersebut ialah dipilih secara langsung anggota DPR/MPR, DPRD, DPD dan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Damsar, 2010:186).

## 2.2 Konsep Representasi Politik

Menurut Pitkin, dalam bukunya Nuri Soeseno, representasi adalah sebuah gagasan yang diciptakan oleh manusia. Karena gagasan manusia maka konsep representasi dapat diterima oleh satu orang tetapi

dipertanyakan oleh orang lain. orang bahkan bisa saja mereduksi gagasan ini sedemikian rupa hingga representasi dianggap ada karena orang percaya bahwa ia ada. Sebuah konsep oleh karena itu bisa dimaknai aneka macam oleh orang-orang yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda. Sebuah konsep saja tidak terlalu besar manfaatnya tanpa disertai oleh unsur-unsur lain yang dapat menjelaskan makna definisi tersebut, misalnya situasi, cara penggunaan, informasi tentang apa yang direpresentasikan. Menurut Pitkin masih dalam bukunya Nuri Soeseno, yang kita butuhkan bukan hanya sebuah definisi yang tepat, tetapi cara yang layak untuk menggunakan dalam berbagai situasi (konteks) yang berbeda bagaimana sesuatu yang tidak ada dibuat ada dan siapa yang melakukan hal ini (Suseno 2013:36).

Pitkin dalam bukunya Nuri Soeseno mengidentifikasi ada empat pandangan yang berbeda mengenai representasi. Keempat pandangan tersebut yaitu formal, substantif, simbolis dan deskriptif. Dua pandangan pertama (formalistis dan deskriptif) menjelaskan representasi sebagai atau '*way of acting*' atau '*acting for*', sedangkan dua pandangan terakhir (simbolis dan substantif) menjelaskan representasi sebagai '*way of being*' atau '*standing for*' untuk memahami makna konsep tersebut maka perlu diketahui konteks tertentu dalam mana konsep tersebut diletakan.

- A. Representasi formal disebut sebagai pemberian wewenang secara hukum kepada wakil sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan untuk merepresentasikan berbagai kehendak, interaksi ini menghasilkan suatu bentuk tanggung jawab yang ditanggung bersama antara wakil dan terwakil.
- B. Representasi simbolis adalah cara-cara seorang wakil membela atau berdiri dengan mengatasnamakan konstituennya. Simbol dapat merepresentasikan sesuatu atau menghadirkannya atau merepresentasikannya, meskipun sesuatu itu tidak ada. Dalam bentuk representasi ini tidak diperlukan kesamaan atau kemiripan diantara yang merepresentasikan dan yang direpresentasikan. Manusia juga bisa dilihat sebagai simbol yang merepresentasikan, misalnya seseorang dapat pula merepresentasikan sebuah bangsa dalam sebuah institusi tertentu, misalnya seorang raja yang secara konstitusional merupakan representasi dari sebuah bangsa.
- C. Representasi yang deskriptif merupakan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau kemiripan diantara wakil dan pemilihnya (atau di antara yang memilih dan yang dipilih). Dalam

bentuk representasi ini maka wakil tidak bertindak untuk (*act for*) orang lain, tetapi ia mengatasnamakan (*stand for*). Dengan bentuk representasi ini maka wakil menghadirkan sesuatu yang absen dengan mengangkat kemiripan atau mencerminkan kesamaan – layaknya seperti melihat cermin atau seperti dalam seni. Contoh yang sering dipergunakan adalah representasi bagi kelompok perempuan atau kelompok minoritas. Representasi yang sebenarnya menurut sejumlah penulis masyarakat bahwa wakil-wakil yang menjadi anggota parlemen haruslah mencerminkan secara tepat komposisi seluruh bangsa.

- D. Representasi substantif. Disebut juga sebagai representasi '*acting for*' adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti dari yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil mempresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya. Dalam representasi ini maka tidak diperhitungkan isu pengelompokan berdasarkan geografis (distrik) atau bentuk pengelompokan lainnya yang bisa digunakan dalam representasi formalistis. Contoh yang dapat digunakan untuk bentuk representasi ini misalnya mewakili satwa langka yang hampir punah. Keempat macam representasi yang dikemukakan oleh Pitkin ini merupakan bentuk representasi yang muncul terkait dengan gagasan aktivitas, misalnya membuat representasi yang deskriptif atau menciptakan sebuah simbol.

Konsepsi representasi Pitkin masih mencerminkan pemikiran tradisional representasi politik oleh karena itu memiliki keterbatasan. Ada dua ciri pemikiran tradisional yang sekaligus merupakan tantangan yang harus dihadapi konsepsi tradisional representasi politik. Pertama, fokus yang sangat kuat pada pemilu, baik dalam gagasan maupun praktik. Kedua, fokus yang masih sangat kuat pada karakter dan penampilan dari wakil di satu sisi dan mengabaikan yang diwakili di sisi lain.

Menurut Hanna Pitkin dalam bukunya Nuri Soeseno, kontradiksi yang terdapat dalam konsep representasi tidak harus dihilangkan. Sifat kontradiksi yang terkandung dalam pemaknaan konsep tersebut menghadirkan yang tidak ada atau yang absen justru seharusnya dapat dipertahankan. Menurutnya otonomi baik dari pihak yang direpresentasikan (konstituen) maupun yang merepresentasikan (para wakil) harus terus dijaga. Para wakil harus menjaga kapasitas otoritas pemilih serta

menjunjung tinggi akuntabilitas dan kapasitas untuk dapat bertindak independen dari kehendak para pemilih. Akan tetapi ia juga mengatakan bahwa konstituen harus bisa mengatakan apa yang menjadi keinginannya. Kepentingan yang objektif menjadi kunci apakah otonomi pemilih dan otonomi para wakil telah dilanggar. Jika seorang wakil melanggar keinginan konstituen maka seorang wakil harus dievaluasi berdasarkan isu yang ditanganinya dan lingkungan politik dimana ia harus bertindak. Menurut Pitkin masih dalam bukunya Nuri Soeseno, sebuah pemerintah dapat dikatakan representatif bukan dengan membuktikan bahwa rakyatnya dapat dikontrolnya, tetapi dengan menunjukkan bahwa rakyatnya mempunyai kontrol atas apa yang dilakukan pemerintah.

### **2.3 Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik menurut Ramlan Subakti dalam (Dalimunthe, 2009) merupakan proses dimana partai politik melakukan seleksi pemilihan dan pengangkatan anggota baru untuk melaksanakan peranannya secara umum dalam politik dan perannya secara khusus dalam pemerintahan. Untuk menjalankan peran dalam politik dan pemerintahan, partai politik tentunya menginginkan orang yang direkrut memiliki kapabilitas yang baik, sebab hanya dengan kader yang demikian partai politik mendapat kesempatan lebih besar untuk dapat mengembangkan diri hingga berpeluang untuk mengajukan calon hingga kepemimpinan nasional.

Kepentingan partai politik selain untuk mencapai tingkat nasional, partai politik memiliki kepentingan untuk menjangkau seluas-luasnya keanggotaan dengan tujuan untuk memperluas partisipasi politik masyarakat sekaligus menjaga kontinuitas serta kelestarian partai politik (Budiardjo, 2008). Maka sebab itu rekrutmen politik menjadi proses serta fungsi dari partai politik yang sangat penting.

Menurut Pippa Norris dan Lovenduski, proses rekrutmen politik terbagi menjadi dua pola rekrutmen. Pertama pola rekrutmen vertikal, merupakan rekrutmen politik yang dilaksanakan secara hierarkis dengan jalur structural organisasi partai. Pada proses rekrutmen ini yang paling menentukan kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan politik adalah organisasi partai. Dalam proses rekrutmennya didasarkan pada keahlian, prestasi serta keterampilan yang dimiliki kader tersebut. Kedua, pola rekrutmen lateral, merupakan pola rekrutmen yang mana pada proses rekrutmennya dibuka pada setiap individu baik dalam organisasi partai maupun luar partai yang memenuhi syarat. Proses rekrutmen dilakukan

secara desentralisasi, dimulai dari pemilihan kandidat potensial pada kepengurusan partai tingkat lokal yang terendah, hingga tingkat yang tertinggi.

Pippa Norris dalam (Tamara, 2020) mengidentifikasi terdapat tiga tahapan yang mempengaruhi proses rekrutmen politik yakni sertifikasi, nominasi dan pemilu.

1. Pertama sertifikasi merupakan tahap proses awal yakni seleksi administratif yang wajib diikuti setiap orang yang dilaksanakan oleh partai politik, dengan mengedepankan hukum pemilu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga internal partai.
2. Kedua tahap nominasi, pada tahapan ini peserta yang telah memenuhi persyaratan pada tahapan sebelumnya kemudian dibimbing oleh partai politik sebagaimana perannya. Pada tahap ini menjadi bagian untuk menentukan siapa anggota partai yang akan di nominasikan untuk dapat menjadi caleg. Proses nominasi dilakukan dengan cara menseleksi anggota terbaiknya dengan menilai kapabilitas anggota yang berpengaruh terhadap mewujudkan komposisi pemerintahan yang lebih baik. Peran partai politik menurut Norris meliputi pencalonan kandidat dalam pemilu, memberikan jaringan sosial seperti konstituen dan elemen pendukung lainnya kepada calon legislatif, memberikan pelatihan dan pengalaman organisasi guna meningkatkan kualitas kader.
3. Ketiga tahapan proses pemilu, tahapan ini merupakan tahapan terakhir dimana calon akan dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan legislatif untuk menempati kursi pemerintahan.

#### **2.4 Kategori Partisipasi Politik**

Ada beberapa cara dalam membuat kategori atau tipologi partisipasi politik. Menurut Surbakti, Miriam Budiardjo, Mas"oed, dan Mc Andrews penggolongan partisipasi politik (Cholisin dan Nasiwan, 2012:147-152), misalnya penggolongan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif, partisipasi politik dari dimensi stratifikasi sosial, dan berdasarkan jumlah pelaku, partisipasi politik berdasarkan tinggi rendahnya kedadaran politik, frekuensi dan intensitasnya, konvensional dan non konvensional. Golongan politik tersebut yakni:

1. Penggolongan berdasarkan Partisipasi aktif dan partisipasi pasif.
2. Penggolongan Partisipasi politik dilihat dari dimensi stratifikasi sosial.
3. Penggolongan Partisipasi berdasarkan jumlah pelaku.

4. Penggolongan Partisipasi politik berdasarkan tinggi rendahnya kesadaran politik.
5. Penggolongan partisipasi politik berdasarkan frekuensi dan intensitas
6. Penggolongan partisipasi politik dalam konvensional dan non konvensional

Terdapat dua variabel yang mempengaruhi partisipasi politik warga negara biasa. Dua variabel itu adalah kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah (sistem politik). Dua variabel tersebut tidaklah berada pada kutub yang berlawanan sekaligus menentukan sikap dan perilaku warga Negara dalam perilaku politiknya, tetapi berada secara integral dengan faktor-faktor lain seperti status sosial, status ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman berorganisasi. Status sosial berarti kedudukan seseorang dalam kelompoknya yang disebabkan baik oleh tingkat pendidikan maupun oleh pekerjaan. Tingkat status sosial yang tinggi memungkinkan perilaku politik yang lebih berkualitas dari seseorang yang berada dalam status sosial dibawahnya. Status sosial ekonomi ialah kedudukan seorang warga negara dalam pelapisan sosial yang disebabkan oleh pemikiran kekayaan. Dengan status sosial ekonomi yang tinggi diperkirakan 29 seseorang akan memiliki tingkat pengetahuan politik, minat, dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah (Sastroatmodjo, 1995:15).

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah suatu acuan peneliti untuk membandingkan peneliti dengan hasil peneliti yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, Penelitian terdahulu menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya namun memiliki kesamaan dengan tema dibahas oleh peneliti. Berikut merupakan penelitian- penelitian yang terkait dengan judul penulis sebagai berikut:

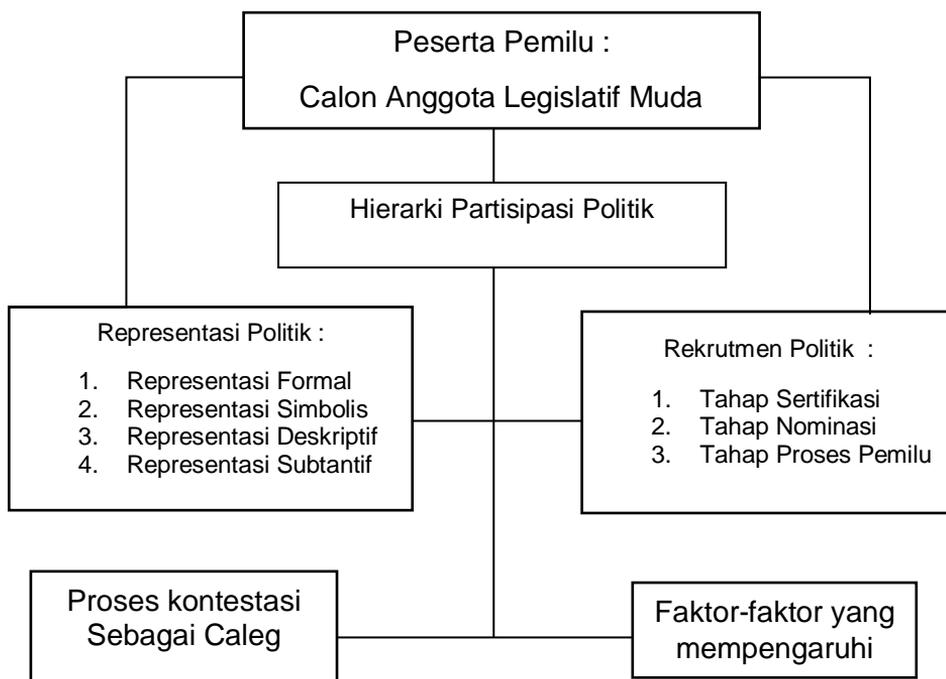
1. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Wicaksono dengan judul "Pemuda Dalam Kontestasi Politik : Melacak Alasan Rasional Calon Anggota Legislatif Muda DPRD Kota Pekanbaru Di Pemilihan Legislatif Tahun 2019". Adapun hasil dari penelitian ini adalah rata-rata para calon muda Kota Pekanbaru memiliki sumber daya yang cukup kuat dalam basis finansial, sehingga mereka dapat mengalokasikan banyak biaya pada alat peraga kampanyenya. Modal finansial tidak hanya basis bagi para calon muda dalam bertarung dalam kontestasi politik pemilu DPRD Kota Pekanbaru ini. Banyak kalangan pemuda ini juga memiliki basis keukutan keluarga yang menjadi salah satu faktor kuat untuk

dapat memenagkan kontestasi politik Keluarga bukan saja menjadi penopang utama dalam modal ekonomi seorang caleg untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu, melainkan juga menjadi pendorong motivasi caleg muda untuk mau menjadi caleg. Rata-rata, caleg muda banyak yang berasal dari keluarga berpengaruh yang berlatar belakang seperti politisi, pengusaha kaya, maupun ASN/mantan ASN yang mempunyai jabatan tinggi. Caleg muda kemudian mengambil posisi untuk turut berpengaruh dalam arena kekuasaan ditingkat local (Wicaksono, 2019).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad adjie Akbar Anzulai dengan judul “Rekrutmen Politik Generasi Millenian Partai Aceh” adapun hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Partai Aceh saat telah melakukan perubahan dan mekanisme dalam menghimpun kekuatan dan menarik minat generasi milenial untuk dapat bergabung di Partai Aceh. Pola yang sebelumnya yang menerapkan sistem rekrutmen tertutup dan saat ini pola rekrutmen yang terbuka menunjukkan Partai Aceh sangat berbenah atas kekurangan mereka. Dampak kemunculan Muda Seudang sangat berperan penting dalam proses menjaring generasi milenial Aceh dalam partipasi ke dalam Partai Aceh sehingga ini menjadi modal yang sangat bagus bagi Partai Aceh sendiri dengan adanya Muda Seudang secara tidak langsung, akan menjadikan kader-kader yang dipersiapkan untuk dapat berproses di Partai Aceh. Partai Aceh harus mengikuti perkembangan kualitas demokrasi yang salah satunya melakukan regenerasi di internal Partai Aceh dan menjadi institusi Partai politik yang modern dalam dinamika politik lokal maupun nasional (Anzulai, 2022).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Amul Hikmah dengan judul “Partisipasi pemuda dalam Kontestasi Politik Di Kabupaten Maros Studi kasus : Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019” adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemuda dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif terbagi atas tiga yaitu idealisme pemuda, kuasa relasi dan modal, serta pelengkap syarat administratif. Pertama, idealisme pemuda berkaitan dengan pengalaman organisasi pemuda dan aktifitas selama menjadi mahasiswa di kampus. Kedua kuasa relasi dan modal, memanfaatkan ketokohan dan modal besar urang tua pemuda tersebut untuk maju bertarung. Ketiga, pelengkap syarat admisistratif, berkaitan dengan regulasi pemilu yang memanfaatkan pemuda untuk turut serta sebagai peserta pemilu dan dilakukan oleh elit partai politik (Hikmah, 2020).

Dari ketiga penelitian tersebut memiliki relevansi yang terkait dengan penelitian ini yang secara umum menjelaskan terkait bagaimana partisipasi pemuda dalam kontestasi politik serta metode penelitian kualitatif. Adapun dari ketiga penelitian diatas menjadi rujukan penulis untuk menyusun dan melakukan penelitian ini

## 2.6 Kerangka Berfikir



Berdasarkan pada pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan menggali kecenderungan partisipasi politik pemuda dimulai dengan penjelasan representasi politik dan rekrutmen politik kemudian membahas faktor apa saja yang mempengaruhi atau mendorong pemuda untuk terlibat sebagai kontestan. Penekanannya adalah dari segala gejala yang ditemukan akan memberikan sebuah pandangan mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemuda untuk mengikuti kontestasi Pemilu, apakah akan berdampak pada proses mendapatkan kursi legislatif. Penelitian ini membahas tentang kepemudaan, peranan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh para pemuda dalam ranah perpolitikan di kabupaten Soppeng. Tujuannya adalah Terwujudnya kesadaran partisipasi politik pemuda dalam kontestasi politik di kabupaten Soppeng.